

# KINERJA RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

PANGKY GUNAWAN  
BUCE BONIFASius PATI  
STEFANUS SAMPE

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kinerja relawan demokrasi dalam memberikan pendidikan pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap sejumlah informan dan data. Informan relawan demokrasi dipilih secara random sampling atau secara acak di masing-masing basis pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja relawan demokrasi sangat mempengaruhi dalam proses pemberian edukasi atau pendidikan pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yakni kinerja relawan demokrasi belum optimal di tinjau dari aspek Kualitas, Kuantitas, Efektivitas Biaya, Ketepatan Waktu, Kebutuhan akan Pengawasan, dan Hubungan antar Personal karena faktor ketrampilan, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki relawan demokrasi mempengaruhi kinerja relawan demokrasi ketika memberikan edukasi atau pendidikan kepada pemilih.*

*Kata Kunci: Kinerja, Relawan Demokrasi, Pendidikan Pemilih*

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Sebagai lembaga yang mendapat mandat untuk menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dapat melaksanakannya secara transparan, akuntabel dan aksesibel.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemilu, Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah menjadikan publik sebagai titik sentral dari kualitasnya suatu pemilihan umum, hal itu dapat dilakukan melalui suatu pendidikan politik. Melalui pendidikan politik, KPU dapat melakukan penyadaran ideologis warga negara akan penggunaan hak dan kewajibannya dalam pemilihan umum dan dapat mempengaruhi dalam demokrasi, sehingga pendidikan politik dapat membentuk perasaan sebagai warga negara yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat nasionalisme yang sebenarnya, senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga

akan jati diri bangsa (Sri Budi Eko Wardani dkk, 2014:76-78).

Kenyataannya, sejak dimulainya era orde baru pada tahun 1999, pemilihan umum legislatif justru mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih yang diikuti dengan meningkatnya angka golongan putih (golput).

Berdasarkan sumber data KPU, Pada pemilihan legislatif tahun 2004, tingkat partisipasi pemilih sebesar  $(124.420.339:148.000.369 \times 100\% = 84,06)$  persen dengan tingkat golput naik sebesar 15,94 persen. Pemilu legislatif tahun 2009, tingkat partisipasi pemilih turun lagi sebesar  $(121.588.366:171.265.441 \times 100\% = 70,99)$  persen dengan tingkat golput naik lagi sebesar 29,01 persen.

Untuk mengantisipasi penurunan angka partisipasi pemilih yang sudah mencapai persentase sebesar 70,99 persen pada tahun 2009 dan untuk memenuhi misi kelima KPU, maka pada tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan sebuah program pendidikan politik yang bernama "Relawan Demokrasi (Relasi)".

Program relawan demokrasi ini dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap KPU Kabupaten/Kota

termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada pemilu legislatif tahun 2014 yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow ketika program relawan demokrasi dibentuk pertama kalinya, tingkat partisipasi pemilih adalah sebesar  $(141.972:169.640 \times 100\% = 83,69)$  persen, dengan angka golput sebesar 16,31 persen.

Kenyataannya, pada pemilu legislatif berikutnya yaitu tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih hanya naik sebesar  $(149.882:178.639 \times 100 = 83,90)$  persen, dengan tingkat golput sebesar 16,10 persen. Bila di dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2014, hanya naik sebesar 0,21 persen. Namun, jika dilihat dari perbandingan jumlah pemilih yang tidak memilih pada tahun 2014 yaitu sebesar  $169.640 - 141.972 = 27.000$  pemilih dan tahun 2019 jumlah pemilih yang tidak memilih bertambah menjadi  $178.639 - 149.882 = 28.000$  pemilih. Bertambahnya jumlah pemilih sebesar 1.000 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya menunjukkan bahwa program ini perlu diperbaiki sehingga dapat optimal dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan Penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu tentang kinerja, yaitu penelitian pertama dari Ni M. D. Karlina (2015) yang berjudul evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dalung pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya muncul daftar pemilih ganda yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pemilu di Kabupaten Badung. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Badung dalam proses pemutakhiran data dengan menggunakan lima indikator dari dwiyanto belum optimal yang telah dibuktikan dengan adanya data nama-nama warga yang bermasalah dimana yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti data pemilih yang di terima KPU dari catatan sipil tidak sinkron, banyak penduduk yang belum melaporkan tentang informasi administrasi kependudukannya, dan dari petugas KPU yang kurang teliti dalam menginput data.

Penelitian kedua diambil dari penelitian Donly N. Bilote (2016) dengan judul Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Teori kinerja yang menjadi rujukan penelitian ini adalah teori kinerja yang dikemukakan oleh Kumorotomo (dwiyanto et al, 2013) terkait dengan efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa untuk kinerja KPU Bitung dengan menggunakan empat indikator dari Kumorotomo belum maksimal karena kompleksnya permasalahan KPU kota Bitung diantaranya belum efisiennya kinerja KPU Kota Bitung karena jumlah Sumber Daya Manusia di tingkatan Sekretariat belum memadai serta ketersediaan anggaran operasional pemilu yang kurang memadai.

Penelitian ketiga diambil dari penelitian Syamsi Darni (2018) dengan judul Kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan daftar pemilih terkait kinerja PPS dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Teori kinerja yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Bernardin (Sudarmanto, 2015:12) terkait dengan quality, quantity, timeliness, cost effectiveness, need for supervision, dan interpersonal impact. Dari hasil penelitian ini dengan menggunakan enam indikator, hasilnya belum optimal diantaranya pengetahuan PPS yang belum cukup untuk tahapan itu, honorarium PPS yang masih cukup rendah dan mempengaruhi kualitas kerja, adanya tahapan rekapitulasi daftar pemilih melebihi jadwal tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan lemahnya pengawasan secara internal menyebabkan kinerja PPS tidak maksimal.

Persamaan ketiga penelitian terdahulu yang telah digambarkan diatas dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengambil tentang kinerja organisasi. Sementara perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: bahwa kalau penelitian terdahulu menilai kinerja dari KPU maupun kinerja panitia pemungutan suara (PPS) maka penelitian ini menilai kinerja dari relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan pemilih pada pemilihan umum

legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019.

Program dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan pencapaian tujuan dari program menunjukkan hasil kerja atau prestasi kerja baik individu maupun kelompok dan menunjukkan sebagai kinerja atau performa organisasi (Wibowo, 2017:11). Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja adalah menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Program relawan demokrasi yang telah dibentuk harus diikuti dengan penilaian atau pengukuran kinerja agar dapat diketahui hasilnya dan tujuan pencapaian program apakah tercapai atau tidak. Sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap kinerja relawan demokrasi dan tujuan dari program relawan demokrasi tersebut dapat tercapai.

Oleh karenanya, diperlukan suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui bagaimana kinerja relawan demokrasi. Sehingga peneliti memilih judul Kinerja Relawan Demokrasi dalam Pendidikan Pemilu pada pemilihan Legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kinerja**

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Wibowo, 2017:2). Selanjutnya Armstrong dan Baron (Wibowo, 2017:2) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Colquitt, Lepine dan Wesson (Wibowo, 2017:2) mengemukakan bahwa kinerja adalah nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi, baik secara positif maupun negatif pada penyelesaian tujuan organisasi. Pendapat lain memandang kinerja sebagai cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran dan penilaian (Cascio dalam Wibowo, 2017:2). Pendapat lain lagi menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria lain dari efektivitas (Gibson,

Ivancevich, Donnely, dan Konopaske dalam Wibowo, 2017:2).

Indikator kinerja adalah aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Hasil dari pengukuran indikator kinerja dapat menjadi masukan bagi banyak pihak. Mengukur kinerja relawan demokrasi pada pemilihan legislatif, penulis menggunakan teori dari Bernardin (Sudarmanto, 2015:12) yang menekankan ukuran kinerja individu pada 6 (enam) indikator kinerja, yaitu:

- 1) Quality is “the degree to which the process or either conforming to some ideal way performing the activity or fulfilling the activity’s intended purpose”. Kualitas adalah suatu tingkatan yang menunjukkan proses pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dari suatu pekerjaan yang mendekati kesempurnaan.
- 2) Quantity is the amount produce, expressed in such term as dollar value, number of unit or number of completed activity cycler”. Kuantitas merupakan jumlah yang diproduksi yang dinyatakan dalam nilai mata uang, jumlah unit produksi ataupun dalam jumlah siklus aktivitas yang telah terselesaikan. Dengan kata lain kuantitas terkait dengan satuan jumlah pekerjaan yang dihasilkan, Miner (Sudarmanto, 2015:12).
- 3) Timeliness is the degree to which an activity completed, or a result produced, at the earliest time desirable from the stand points of both coordinating with the outputs of other and maximizing the time available for the other activities”. Timeliness atau ketepatan waktu merupakan suatu tingkatan yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Dengan kata lain ketepatan waktu terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk. Menurut Miner (Sudarmanto, 2015:12) ketepatan waktu terkait dengan penggunaan waktu dalam kerja (tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja yang hilang)
- 4) Cost effectiveness is the degree to which the use of organization resources (eg. human, monetary, technological, material) is maximized is in the sense of getting the

highest gain or reduction in loss form each unit instead of use of resources". Cost effectiveness atau efektivitas biaya merupakan suatu tingkatan yang paling maksimal dari penggunaan sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau mengurangi kerugian dari masing-masing unit atau sebagai pengganti dari penggunaan sumber daya. Dengan kata lain efektivitas biaya terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi. Menurut Amstrong (Sudarmanto, 2015:13) ketepatan biaya terkait pendapatan, pengeluaran dan pengembalian).

- 5) Need for supervision is the degree to which the performer can carry out job function without either having to request supervisory, intervention in prevent an adverse outcome". Needfor supervision merupakan suatu tingkatan dimana seseorang dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa harus ada pengawasan atau campur tangan atasan. Dengan kata lain kebutuhan akan pengawasan terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa eksistensi pimpinan atau intervensi pegawai pimpinan.
- 6) Interpersonal impact is the degree to which a performer promotes feeling selfsteem, goodwill, and cooperation among coworkers subordinates". Interpersonal impact atau hubungan antar perseorangan merupakan suatu tingkatan keadaan dimana seseorang dapat menciptakan suasana nyaman dalam bekerja, percaya diri, berbuat baik dan kerja sama antar rekan sekerja. Dengan kata lain tingkatan dimana seseorang mampu mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik serta kerja sama dengan sesama rekan kerja maupun pimpinan atau atasan. Menurut Miner (Sudarmanto, 2015:12) hal ini terkait dengan kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.

## Relawan Demokrasi

Volunteer (relawan) menurut Schroeder (1998:10) adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal. Relawan adalah orang-orang yang dengan sukarela memberikan waktu dan bakat dalam hal pemberian pelayanan atau melakukan tugas tertentu tanpa mengharapkan imbalan yang sifatnya finansial (President's Task Force on Private Sector Initiative dalam Thoits and Hewitt, 2001:24). Sementara menurut Wilson (2000:12) mengemukakan vounteering (kerelawanan) adalah aktivitas memberikan waktu secara cuma-cuma untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kelompok, atau suatu organisasi. Definisi oleh wilson ini tidak membatasi bahwa volunteering dapat saja memberi keuntungan atau manfaat bagi relawan yang menjalankannya.

### 1) Relawan demokrasi

Relawan demokrasi dibentuk oleh KPU tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan program relawan demokrasi pemilu 2019 No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019. Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

#### a. Pendidikan Pemilih

Buku pedoman pendidikan pemilih yang dikeluarkan KPU, Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk

sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal. Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pemilih adalah setiap warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu dilaksanakan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta warganegara Indonesia sebagai syarat untuk disebut pemilih. Sosialisasi politik selain dilakukan oleh penyelenggara, juga dilakukan oleh partai politik. Ada berbagai fungsi yang dapat dilakukan oleh partai politik seperti mengorganisir opini publik, melakukan sosialisasi politik dan menciptakan stabilitas politik (Smith & LaPalombara & Weiner dalam Sampe 2015:24).

b. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan Umum (general election) adalah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud untuk membentuk sebuah pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Cahyono, 2009:6). Harmaili Ibrahim (didalam Labolo Dkk, 2017:50) mendefinisikan pemilu sebagai suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat. `Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat (Umaruddin Masdar dkk, 1999:177). Sedangkan menurut Andrew Reynolds (2001:102) pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen.

**METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini untuk menghasilkan data-data yang menggambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai kinerja Relawan Demokrasi dalam pendidikan pemilih pada pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019.

Informan dalam penelitian ini adalah relawan demokrasi yang melakukan secara langsung kegiatan sosialisasi dan merupakan aktor dalam masalah penelitian ini. Melalui keterangan informan dan data yang diperlukan, maka akan mampu menjawab permasalahan penelitian ini yang berhubungan dengan gambaran fenomena dan fakta tentang kinerja relawan demokrasi pada penyelenggaraan pemilihan legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019. Pemilihan informan relawan demokrasi dilakukan secara random sampling atau secara acak di masing-masing basis pemilih. Dengan berbagai pertimbangan baik kebutuhan data, waktu maupun biaya sehingga informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang masing-masing berasal dari:

- 1) Relawan Demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow sejumlah 10 (sepuluh) orang di 10 basis pemilih;
- 2) Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Divisi Sosialisasi dan Parmas sejumlah 1 (satu) orang;

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif dimana peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian (Sugiyono, 2017:225) dengan menggunakan :

- 1) Wawancara
  - a. Wawancara terstruktur (structured interview)
 

Digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data dimana menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
  - b. Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) wawancara

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pada metode ini, peneliti langsung mengunjungi daerah domisili relawan demokrasi untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap informan relawan demokrasi

## 2) Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti jauh sebelum peneliti menyusun tesis ini. Observasi dilakukan oleh peneliti terhadap relawan demokrasi yang dibentuk pada tahun 2014. Hal ini yang menjadi dasar penulis dalam menyusun usulan penelitian ini.

## 3) Dokumentasi

Penggunaan dokumen yang berhubungan langsung dengan kinerja relawan demokrasi pada penyelenggaraan pemilihan legislatif di kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan sehingga bisa membantu dalam menjawab permasalahan kinerja relawan demokrasi dalam memberikan pendidikan pemilih pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1) Quality (Kualitas)

Quality atau kuantitas menurut Bernardin (Sudarmanto, 2015:12) adalah suatu tingkatan yang menunjukkan proses pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dari suatu pekerjaan yang mendekati kesempurnaan. Menurut Goetch dan Davis, kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.

Kualitas kinerja individu sangat ditentukan dari kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut, besar maupun kecilnya kompetensi individu dapat mempengaruhi proses maupun hasil yang dicapai.

Kompetensi menurut Wibowo (2017:271) adalah suatu kemampuan untuk

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Kompetensi individu dapat mempengaruhi proses maupun hasil yang dicapai dalam suatu organisasi. Berbicara kompetensi tidak terlepas dari hubungannya dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berkompeten dapat membuat kinerja individu dalam sebuah organisasi lebih berkualitas dalam proses dan hasil yang dicapai.

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja atau kompetensi yang dipunyai individu tersebut. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat seseorang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, pengalaman kerja dapat memungkinkan untuk peningkatan kinerjanya yang semakin tinggi.

Kualitas relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih dapat berpengaruh terhadap keputusan pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Sumber daya manusia yang berkompeten sangat berperan penting terhadap kualitas kinerja relawan demokrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan adalah salah satu komponen kompetensi yang bisa mengukur kualitas kinerja individu dalam organisasi. Kemampuan menurut Winardi (2002:16) terbagi atas tiga aspek yakni ketrampilan, pengetahuan/pendidikan, dan pengalaman kerja. Tiga aspek ini yang dapat mendorong peningkatan kompetensi sumberdaya manusia sehingga lebih berkualitas. Keterampilan dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain sangat berpengaruh dalam aktivitas dan pekerjaan setiap individu. Pengetahuan yang cukup

terhadap bidang pekerjaan yang ditekuni juga memberi dampak positif dan berpengaruh terhadap kualitas kinerja individu. Aspek pengalaman kerja juga memegang peranan penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang dalam tugas. Seseorang yang mempunyai pengalaman kerja akan lebih berkualitas kinerjanya dibandingkan dengan seseorang yang belum berpengalaman sama sekali.

Sumber daya manusia yang trampil, berpendidikan dan mempunyai pengalaman kerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang trampil, berpengetahuan, dan mempunyai pengalaman yang cukup dapat dihasilkan melalui pemberian materi dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis yang sering dilakukan. Meskipun dari aspek rekrutmen sumber daya manusia sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, namun jika tidak diikuti dengan pelatihan atau bimbingan teknis yang cukup untuk meningkatkan keterampilan atau pendidikan dan pengetahuan dari aspek yang diperlukan dalam pekerjaan, maka kualitas sumber daya manusianya masih akan rendah. Terlebih jika individu yang bersangkutan tidak mau untuk belajar atau memotivasi diri sendiri, maka tidak akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pada akhirnya kualitas kinerjanya tidak akan baik.

Pada pelatihan atau bimbingan teknis untuk pembekalan bagi relawan demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow hanya dilakukan sekali saja, setelah itu ada 2 kali pertemuan yang berbentuk rapat dan bukan pemberian materi. Kurangnya pemberian materi dalam bentuk bimbingan teknis membuat relawan demokrasi cukup kesulitan ketika memberikan pendidikan kepada pemilih, terlebih lagi modul yang diharapkan dapat menjadi guidance atau panduan bagi relawan demokrasi diberikan ketika kegiatan edukasi ke pemilih sudah berlangsung.

Tujuan dari pendidikan atau edukasi ke pemilih adalah meningkatkan kerelawanan pemilih untuk ikut serta dalam proses

politik yang didorong oleh suatu idealism tertentu dengan tanpa pamrih. Dengan meningkatnya kerelawanan, maka pragmatisme dapat dicegah. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Oleh karena itu, pendidikan pemilih menjadi sangat penting dan harus diseriuisi oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, karena keputusan pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu juga dapat bergantung pada bagaimana relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia dalam keanggotaan relawan demokrasi yang trampil, mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai pengalaman kerja khususnya dalam hal kepemiluan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa anggota relawan demokrasi cukup kesulitan dalam memberikan pendidikan ke pemilih. Ini disebabkan kurangnya ketrampilan dan pengetahuan yang cukup tentang kepemiluan. Ketrampilan dan pengetahuan yang kurang disebabkan kurangnya bimbingan teknis yang diberikan selama program relawan demokrasi berlangsung. Informan RS yang merupakan koordinator relawan demokrasi basis pemilih pemula mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis hanya diberikan satu kali selama program berlangsung, yaitu saat pengukuhan anggota relawan demokrasi. Pendapat informan RS tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Informan H yang merupakan komisioner divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang mengatakan bahwa pemberian bimbingan teknis hanya sekali dilakukan. Informan RS menambahkan bahwa pemberian modul materi kepemiluan yang mereka harapkan dapat menjadi pedoman atau guidance dalam membantu mereka ketika memberikan edukasi kepemiluan kepada pemilih terlambat diberikan oleh KPU kabupaten Bolaang Mongondow. Modul materi kepemiluan tersebut menurut informan RS diberikan ketika kegiatan pendidikan ke pemilih sudah masuk bulan Februari sementara program edukasi ke

pemilih dimulai pada tanggal 23 Januari tahun 2019.

Aspek pengalaman yang dimiliki oleh para relawan dinilai juga menjadi hal yang penting dalam pencapaian kualitas kinerja individu relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih yang pada akhirnya akan membantu pencapaian kualitas kinerja program relawan demokrasi itu sendiri. Dari jumlah 52 anggota relawan demokrasi pada pemilihan legislatif di kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019, hanya 1 orang anggota relawan demokrasi yang sudah 2 kali menjadi anggota relawan sementara sisanya baru sekali menjabat. Kemudian dari segi latar belakang, hanya 1 orang anggota relawan yang pernah menjabat sebagai penyelenggara sementara sisanya belum pernah menjadi penyelenggara. Berdasarkan hal di atas, dapat terlihat bahwa hampir semua anggota relawan demokrasi adalah mereka yang baru menjabat dan belum pernah menjadi penyelenggara, sehingga belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pencapaian kualitas kinerja individu dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih.

## 2) Quantity (Kuantitas)

Quantity atau kuantitas menurut Miner (Sudarmanto, 2015:12) adalah jumlah pekerjaan yang dihasilkan, sedangkan menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:56) kuantitas kerja adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran atau padanan angka lainnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja. Jumlah kerja adalah banyaknya kegiatan yang dapat diselesaikan secara baik dan benar.

Dalam penelitian ini, jumlah pekerjaan adalah jumlah kegiatan yang dilakukan dalam memberikan edukasi atau pendidikan kepada pemilih.

Berdasarkan hasil penelitian jika dilihat dari aspek ini, menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang dilakukan oleh relawan demokrasi di masing-masing basis yang sebanyak 7 kegiatan belum dapat mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Dari

sebanyak 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow, jika dimisalkan setiap relawan demokrasi di masing-masing basis melaksanakan 7 kegiatan per 1 kecamatan, maka hanya ada 7 kecamatan yang mendapatkan edukasi atau pendidikan ke pemilih sementara sisa 8 kecamatan tidak mendapatkan edukasi kepemiluan tersebut.

Tujuan dari pendidikan atau edukasi ke pemilih adalah meningkatkan kerelawanan pemilih untuk ikut serta dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealism tertentu dengan tanpa pamrih. Dengan meningkatnya kerelawanan, maka pragmatisme dapat dicegah. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Untuk mencapai tujuan edukasi tersebut, diperlukan kegiatan relawan demokrasi yang bersifat menyeluruh dan dapat menjangkau semua pemilih di masing-masing basis yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow.

Namun karena kegiatan edukasi yang dapat dilakukan hanya berjumlah 7 kegiatan, maka tujuan edukasi kepada pemilih tersebut tidak akan tercapai secara optimal dari aspek kuantitas.

## 3) Timeless (Ketepatan Waktu)

Timeliness atau ketepatan waktu menurut Jerry Harbour (Sudarmanto, 2015:13) adalah waktu yang diperlukan dalam menghasilkan produk barang dan jasa tersebut. Sedangkan menurut Bernardin (Sudarmanto, 2015:12) timeliness atau ketepatan waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk. Dengan demikian ketepatan waktu menyangkut waktu yang diperlukan dalam mengerjakan suatu aktivitas.

Dalam penelitian ini, ketepatan waktu adalah waktu yang diperlukan dalam mencapai tujuan dari edukasi atau pendidikan kepemiluan kepada pemilih.

Pada pemilihan umum tahun 2019, komisi pemilihan umum memberikan waktu selama 3 bulan untuk melaksanakan program edukasi kepada pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi. Dalam 3 bulan pelaksanaannya, relawan

demokrasi di masing-masing basis pemilih hanya diharuskan untuk melaksanakan 7 kegiatan saja, sementara sisa waktu yang ada dipakai untuk melakukan pemberitahuan kepada tetangga atau masyarakat sekitar tempat domisili relawan demokrasi tersebut.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow yang membentuk program kegiatan edukasi pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi di kabupaten Bolaang Mongondow sudah menyampaikan bahwa selain melaksanakan 7 kegiatan di masing-masing basis pemilih, juga dapat memberitahukan atau mengedukasi kepada pemilih seperti: tetangga maupun masyarakat yang ada disekitar tempat domisili dari relawan itu sendiri. Namun relawan demokrasi yang bergerak di masing-masing basis pemilih hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan edukasi yang sifatnya formal atau mengundang pemilih untuk datang. Para relawan demokrasi hanya fokus untuk melakukan 7 kegiatan yang disyaratkan oleh KPU kabupaten Bolaang Mongondow, setelahnya mereka tidak melakukan kegiatan yang sifatnya edukasi kepada pemilih. Hal ini membuat sisa waktu selama 3 bulan yang diberikan oleh KPU, tidak dimanfaatkan oleh anggota relawan demokrasi untuk melaksanakan edukasi kepada pemilih yang berada di sekitar domisili relawan demokrasi. Sehingga dari aspek ketepatan waktu, kegiatan edukasi kepada pemilih menjadi tidak optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, waktu yang diberikan selama 3 bulan sangatlah kurang untuk dapat menjangkau semua pemilih dimasing-masing basis di 15 kecamatan dan 202 desa yang ada di wilayah kabupaten Bolaang Mongondow. Sehingga dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa waktu yang diberikan tidak akan mencapai tujuan dari pendidikan atau edukasi ke pemilih yaitu meningkatkan kerelawanan pemilih untuk ikut serta dalam proses politik dan pencegahan pragmatisme secara optimal, karena program edukasi kepemiluan kepada pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi dilihat dari aspek ketepatan waktu tidak secara menyeluruh

menjangkau semua pemilih di masing-masing basis.

#### 4) Effectivity Cost (Ketepatan Biaya)

Cost effectiveness atau efektivitas biaya menurut Bernardin (Sudarmanto, 2015:12) terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi. Efektivitas biaya dalam manajemen kinerja adalah sebuah metode untuk mengukur efisiensi relatif dari sebuah program dengan membandingkan biaya dengan dampaknya, dengan menggunakan indikator tertentu. Efektivitas biaya secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan dalam organisasi.

Berdasarkan pendekatan di atas, dalam penelitian ini ingin dilihat bagaimana anggaran biaya yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menunjang kegiatan edukasi kepemiluan kepada pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi.

Pada program relawan demokrasi selain ada honor yang diberikan, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow juga memberikan bantuan biaya transportasi bagi 2 orang anggota relawan melalui SPPD yang besarnya masing-masing sebesar Rp. 120.000 untuk 7 kegiatan di masing-masing basis pemilih.

Namun berdasarkan hasil penelitian, besaran bantuan biaya transportasi sebesar Rp.120.000 untuk 2 orang di masing-masing basis pemilih menurut anggota relawan demokrasi sangatlah tidak cukup. Hal ini dikarenakan jumlah anggota relawan demokrasi di masing-masing basis pemilih yang berkisar antara 4 s/d 6 orang sementara yang dapat SPPD hanya 2 orang saja sehingga uang transport tersebut harus dibagi lagi, itupun jumlahnya sangat kecil. Belum lagi ada relawan demokrasi yang sasaran basis pemilih marginal yang berada di wilayah desa terpencil, dimana untuk sampai ke tempat yang di tuju harus melewati medan yang sangat sulit dan hanya kendaraan tertentu saja yang dapat sampai kesana dan untuk itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Sehingga tidak semua anggota relawan basis pemilih marginal yang pergi ke daerah tersebut. Ada juga anggota relawan demokrasi basis pemilih muda yang menyampaikan bahwa dirinya tidak pergi ke tempat kegiatan relawan demokrasi basis pemilih muda, karena SPPD bantuan transportasi yang diberikan KPU itu sangat tidak cukup sehingga harus menyediakan dana sendiri, sehingga informan SM memutuskan untuk tidak pergi kesana. Apa yang diungkapkan oleh informan SM bisa menjadi keluhan dari anggota relawan basis pemilih yang lainnya, karena mereka pasti akan keberatan untuk mengeluarkan dana ekstra untuk pergi ke tempat kegiatan yang jaraknya jauh dari domisili anggota relawan tersebut.

Motivasi atau dorongan seseorang dalam bekerja biasanya dikarenakan ada unsur penghargaan yang ingin di capai dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau aktivitas. Penghargaan tersebut dapat berupa gaji atau honorarium maupun bantuan dana lainnya. Penghargaan berupa gaji atau honorarium maupun adanya bantuan dana lainnya berhubungan dengan kualitas kinerja relawan demokrasi, karena setiap individu cenderung akan termotivasi bekerja dengan baik jika didukung dengan honorarium atau gaji maupun bantuan dana yang sesuai dengan beban kerja dan waktu yang dihabiskan untuk dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Pekerjaan individu yang berkualitas akan mendorong tercapainya hasil yang berkualitas dan pada akhirnya tujuan program akan tercapai.

Keluhan yang timbul dari anggota relawan demokrasi, menunjukkan bahwa bantuan biaya transportasi berupa SPPD yang diberikan, masih sangat kurang dalam memotivasi anggota relawan demokrasi dalam melakukan kegiatan edukasi kepada pemilih, utamanya bagi relawan demokrasi yang berada di basis pemilih marginal.

#### 5) Need For Supervision (Kebutuhan akan pengawasan)

Need for supervision atau kebutuhan akan pengawasan menurut Bernardin (Sudarmanto, 2015:13) terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan

tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan. Pengawasan dilakukan dengan tata cara metode dan tehnik tertentu dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pegawai atau pekerja dalam suatu kegiatan/pekerjaan.

Pendapat dari Harahap (2001:14) bahwa pengawasan adalah system, tehnik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi yang mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Pengawasan menurut Siagian (2005:134) dapat dilakukan dengan mempergunakan cara-cara, yaitu: pertama pengawasan langsung, dilakukan oleh manajer atau atasan langsung pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) observasi ditempat, (c) laporan ditempat. Kemudian pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berbentuk: (a) laporan lisan, (b) laporan tertulis. Kelemahan dari pengawasan bentuk ini adalah bahwa didalam laporan-laporan itu hanya dibuat laporan-laporan yang baik saja yang diduga akan menyenangkan atasan. Manajer yang baik akan meminta laporan tentang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan-laporan itu berlainan dengan kenyataan akan menyebabkan manajer memberi kesan yang berlainan juga mengambil keputusan yang salah.

Pengawasan langsung menurut Hanafi (1998:456) adalah inspeksi teratur yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produksi yang dapat diobservasi. Sedangkan menurut Terry (2003:168) pengawasan langsung dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sehingga bila disimpulkan, maka pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh atasan dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat, dan laporan ditempat pada waktu pekerjaan sedang berlangsung.

Pada pendekatan di atas, dalam penelitian ini ingin dilihat bagaimana pengawasan langsung yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mempengaruhi kinerja relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak melakukan pengawasan secara langsung pada kegiatan edukasi kepada pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow hanya melakukan pendampingan kepada relawan demokrasi dalam hal pemberian materi, itupun jika relawan demokrasi meminta untuk adanya pendampingan tersebut. Ketika KPU kabupaten Bolaang Mongondow turun untuk mendampingi relawan demokrasi dalam memberikan materi di kegiatan edukasi kepada pemilih, disaat itulah pengawasan dilakukan. Kalau bentuk pengawasan seperti ini yang dilakukan oleh KPU kabupaten Bolaang Mongondow, maka pasti relawan demokrasi sudah siap untuk hal seperti itu dan pengawasan seperti itu kurang efektif.

Bentuk pengawasan langsung yang efektif dan sering dilakukan oleh atasan atau institusi untuk melihat apakah program kegiatan berjalan sesuai dengan harapan adalah bentuk inspeksi langsung. Inspeksi langsung dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sifatnya mendadak. Tujuannya untuk mengetahui apakah suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Lemahnya pengawasan dari KPU kabupaten Bolaang Mongondow menyebabkan kedisiplinan relawan demokrasi berkurang, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua anggota relawan mengikuti 7 kegiatan yang diwajibkan oleh KPU untuk diikuti. Seperti contoh: informan relawan SM, anggota relawan demokrasi basis pemilih muda yang mengakui bahwa dirinya hanya mengikuti 5 kegiatan saja dan tidak mengikuti 2 sisa kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman anggota relawan demokrasi di basis pemilih muda. Hal ini jelas akan mempengaruhi kerjanya dari aspek kualitas dan ini tidak

akan terjadi kalau pengawasan secara langsung dilakukan oleh KPU kabupaten Bolaang Mongondow.

#### 6) Interpersonal Impact (Hubungan antar perseorangan)

Hubungan antar perseorangan merupakan suatu tingkatan keadaan dimana seseorang dapat menciptakan suasana nyaman dalam bekerja, percaya diri, berbuat baik dan kerja sama antar rekan sekerja. Dengan kata lain tingkatan dimana seseorang mampu mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik serta kerja sama dengan sesama rekan kerja maupun pimpinan atau atasan.

Setiap satuan kerja memiliki hubungan kerja, misalnya koordinatif, subordinatif, konsultasi atau yang lain yang secara formal harus dapat melakukan hubungan kerja secara sinergis dalam bentuk kerja sama. Dalam organisasi modern, kerja sama antar satuan kerja atau antar orang-perorangan mutlak diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, ada 1 anggota relawan demokrasi pada basis pemilih marginal yang bermasalah. Menurut informan SM yang merupakan koordinator basis pemilih marginal, 1 anggota relawan yang berada di basisnya hanya mengikuti kegiatan sebanyak 1 kali saja dari 7 kegiatan yang seharusnya diikuti, kemudian yang bersangkutan juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan surat menyurat maupun dalam kegiatan edukasi kepada pemilih dengan alasan sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Sehingga dari hubungan personal, yang bersangkutan kurang bisa diajak bekerja sama.

Lemahnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh KPU, juga menyebabkan hubungan personal secara internal diantara anggota relawan demokrasi di basis pemilih marginal, utamanya yang bermasalah tersebut menjadi terhambat dan tidak maksimal. Koordinasi KPU dengan anggota relawan harusnya dapat mengurangi terjadinya masalah internal yang akan menghambat kinerja relawan demokrasi, sehingga proses dan hasil pada kinerja relawan demokrasi akan lebih optimal, yaitu: kerelawanan pemilih dalam ikut dalam

proses politik sesuai tujuan dari pendidikan pemilih itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa Kinerja Relawan Demokrasi dalam memberikan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019 kurang optimal berdasarkan indikator kinerja, yaitu kualitas yang dinilai dari aspek ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan dalam memberikan edukasi atau pendidikan kepada pemilih. Kemudian Kuantitas, Ketepatan waktu, Efektivitas biaya, Kebutuhan akan pengawasan, dan Hubungan antar perseorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Heru. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2009. Jurnal Politik. LP3ES. Jakarta
- Donly N, B. 2014. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Universitas Samratulangi, Manado.
- Hanafi. M. Mamduh. 1998. Manajemen. Akademi Manajemen Perusahaan. YKPN
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Budgeting Penganggaran : Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. PT. Indah Karya (Persero) Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kusnadi. 2002. Masalah Kerja sama, konflik dan kinerja. Edisi Kedua. Taroda. Malang.
- Labolo, Muhadam, Dr.M.Si dan Teguh Ilham, S.Stp.,M.A. 2017. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada Jakarta, Cetakan kedua. Jakarta.
- Mangkunegara A.P. 2014. Evaluasi Kinerja SDM. Refika Aditama. Bandung.
- Masdar, Umaruddin. 1999. Mengasah Naluri Publik Memahami Ilmu Politik. LkiS. Yogyakarta.
- Misgiyanti, A. 1997. Hubungan Antara Kepribadian Penolong & Aspek-aspeknya terhadap Motivasi Menolong. Tesis. Universitas. Indonesia. Depok:
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Rosda. Bandung.
- Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ni Made D, K. 2015. Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam proses pemutakhiran Daftar Pemilih (DPT) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2015. Universitas Udayana, Bali.
- Prabu, Anwar. 2005. Evaluasi Kinerja Sumber daya Manusia. Refika Aditama. Bandung.
- Pratama, Aditya Hadi. 2016. Relawan Sosial ke Relawan Politik. Relawan Jurnal Indonesia. Jakarta.
- Rose, R dan Mosawir. 1967. The Function of Election. Journal Politics. London.
- Reynolds, Andrew. 2001. Sistem Pemilu, IDEA International. United Nations New York. Stockholm.
- Schroeder. 1998. Volunteering. Prentie Hall Press, New York.
- Siagian. Sondang P. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. Edisi Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta
- Sampe. Stefanus. 2015. Political Parties and Voter Mobilisation in Local Government Elections in Indonesia: the case of Manado City. University of Canberra, Australia
- Sudarmanto. 2015. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. Memahami Penelitian Kualitatif. Cv Alfabeta. Bandung.
- Suryadharma. 2013. Manajemen Kinerja. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syamsi Darni. 2015. Kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. Universitas Samratulangi, Manado.
- Terry, R. George. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Thoits, P.A., and Hewitt. 2001. Volunteer Work and Well-Being Journal of Health and Social Behaviour.

Umar, Husein 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ustad Mangku Alam, Erisandi Arditama, Cahyo Seftyono. 2015. Relawan: Dari Gerakan Sosial ke Proyek Politik. Bab 10. Jurnal. Universitas Negeri Semarang. Indonesia.

Wardani Budi Eko Sri dkk, 2014. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. Perludem. Jakarta.

Wibowo, Prof.Dr.SE.M.Phil. 2017. Manajemen Kinerja. PT RajaGrafindo Persada, Edisi Kelima. Depok.

Wilson, John. 2000. Volunteering. Annual Review of Sociology.

Wungu & Brotoharjo. 2003. Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit Sistem. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.

Winardi. 2002. Manajemen Perilaku Organisasi. Edisi Revisi. Kencana, Jakarta

Bahan bacaan lainnya :

Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 05 tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan program relawan demokrasi pemilu

2019 No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109).